



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : REZARIL FRISSANDY
2. Jabatan : PROJECT MANAGER
3. NHK : 868137

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.840.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/270 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.960.000.000

1. MOBIL, LAND CRUISER PICK UP Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. MOBIL, LAND ROVER DEFENDER MINIBUS Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. MOBIL, LAND ROVER SERIES MINIBUS Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. MOBIL, LAND ROVER SERIES PICK UP Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
5. MOBIL, HONDA MOBILIO MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.810.000.000



III. HUTANG

Rp. 778.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.032.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.